



**TESIS**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN BERPOLITIK  
TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMILIHAN UMUM**

***LEGAL PROTECTION OF POLITICAL FREEDOM OF INDONESIAN  
NATIONAL ARMY AND POLICE IN THE INDONESIA REPUBLIC IN THE  
GENERAL ELECTIONS***

**Oleh:**

**BASUKI KURNIAWAN, S.HI.**

**NIM. 120720101019**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**JEMBER**

**2014**

## PERSETUJUAN PENELITIAN TESIS

Judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN BERPOLITIK  
TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMILIHAN UMUM**

***LEGAL PROTECTION OF POLITICAL FREEDOM OF INDONESIAN  
NATIONAL ARMY AND POLICE IN THE INDONESIA REPUBLIC IN THE  
GENERAL ELECTIONS***

Oleh:

**BASUKI KURNIAWAN, S.HI.**

**NIM. 120720101019**

Menyetujui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.

NIP.195612061983031003

Dr. Jayus, S.H., M.Hum.

NIP.1971050111993031001

Mengetahui:

Ketua

Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

Dr. Jayus, S.H., M.Hum.

NIP.195612061983031003

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI TESIS**

JUDUL TESIS : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
KEBEBASAN BERPOLITIK TENTARA NASIONAL  
INDONESIA DAN KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMILIHAN  
UMUM

Tanggal Ujian : ..... Mei 2014

SK Penguji :

Nama Mahasiswa : Basuki Kurniawan, S.HI.

NIM : 120720101019

Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

### **KOMISI PEMBIMBING :**

Pembimbing Utama : Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M. Hum.

Pembimbing Anggota : Dr. Jayus, S.H., M.Hum.

### **TIM DOSEN PENGUJI:**

Dosen Penguji 1 :

Dosen Penguji 2 :

Dosen Penguji 3 :

Dosen Penguji 4 :

**MOTTO:**

**“ Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridloan) Kami, sungguh-sungguh akan KAMI tunjukkan kepada mereka jalan-jalan KAMI.”**

---

**Al-Qur'an Surat No. 29 Al-Ankabut  
Ayat 69.**

**PERSEMBAHAN:**

**Karya ilmiah ini kupersembahkan untuk Bangsa, Negara, dan Almamater tercinta.**

**PERNYATAAN ORISINILITAS TESIS**  
**PROGRAM MAGISTER**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis Saya, Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Ilmu Hukum), baik Universitas Jember maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Tesis ini murni gagasan, ide, rumusan, dan penelitian Saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dikutip dalam naskah ini dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Jember, Mei 2014

Yang membuat pernyataan,

**Basuki Kurniawan**

NIM. 120720101019

## RINGKASAN

Tesis ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Berpolitik Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pemilihan Umum. Masalah pokok yang dikaji adalah : (1) Mengapa TNI dan Polri tidak diberi hak pilih dan dipilih di dalam Pemilu?; (2) Apa konsep perlindungan hukum bagi TNI dan Polri dalam kebebasan berpolitik dilihat dari prinsip Hak Asasi Manusia?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah, dan pendekatan terhadap asas-asas hukum. Sumber data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif.

Hasil penelitian tesis ini adalah : *pertama*, manifestasi kedaulatan rakyat terhadap hak pilih serta dipilih bagi anggota TNI dan Polri dalam Pemilu harus dikembalikan. Kekhawatiran tentang hak pilih serta dipilih anggota TNI dan Polri yang akan menyebabkan konflik atau ketidak netralan dalam Pemilu masih belum mempunyai dasar yang kuat. Sebab secara historis pada Pemilu yang pertama tahun 1955, anggota TNI dan Polri telah ikut berpartisipasi dalam arena politik dan tidak ada sesuatu hal yang mempengaruhi demokratisasi pada masa itu. Dalam optik HAM dan UUD NRI Tahun 1945 bahwa hak pilih dan dipilih dalam Pemilu merupakan *fundamental right*. Hak tersebut telah dilindungi oleh konstitusi dan bersifat *non-derogable right* yang berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali; *kedua*, anggota TNI dan Polri sebagai warga negara Indonesia juga sebagai pribadi mempunyai kedudukan yang sama dengan kalangan sipil lainnya. Jumlah personil TNI dan Polri secara keseluruhan hanya sekitar 400.000, yang sangat jauh dengan penduduk Indonesia secara keseluruhan. Hal ini mengartikan bahwa bila hak pilih TNI dan Polri hendak diarahkan untuk memilih calon atau partai tertentu, maka hal tersebut tidak berpengaruh banyak terhadap perolehan suara; ketiga, hak pilih dan dipilih merupakan suatu hak yang bersifat personal dan bukan institusional. Maka dari itu, Negara mempunyai kewajiban untuk menghormati Hak Asasi Manusia dan mencegah dari melanggar atau mengurangi hak asasi dari warga negaranya, khususnya bagi anggota TNI dan Polri. Kebijakan Pemerintah yang melarang anggota TNI dan Polri untuk memberikan hak pilih dan dipilih merupakan suatu bentuk diskriminasi terhadap warga negaranya hanya disebabkan pekerjaan dan status sosialnya. Negara wajib memberikan perlakuan yang sama dan adil, tanpa adanya diskriminasi terhadap semua warga negara.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan, bahwa pertama, perlu dilakukan rekonseptualisasi dan perubahan terhadap hak pilih dan dipilih bagi anggota TNI dan Polri. Kedua, perlunya perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur hak pilih dan dipilih bagi TNI dan Polri. Pertama, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 39; kedua, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (2); ketiga, Pasal 326 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD.

## SUMMARY

*The title of this thesis is Legal Protection of Political Freedom of Indonesian National Army and Police in the Indonesia Republic in the General Elections. The main problems to be studied are: (1) Why Indonesian National Army and Police in the Indonesia Republic are not given right to vote and be elected in general elections?; (2) What's the concept of legal protection for members Indonesian National Army and Police in the Indonesia Republic in political freedom according to Human Right protection principles?.*

*The method of study use is the juridical normative method. The Approaching of problems use statute approach, conceptual approach, historical approach and due legal principal approach. Research data source is taken from primary and secondary legal materials. The collected data is qualitatively analyzed by a normative juridical approach.*

*The result of this research are : first, manifestation of people sovereignty of right to vote and be elected for members of INA and PIR in general elections must be given it back. The worried bout right to vote and be elected for members of INA and PIR that will make conflict or inneutrality in general election still doesn't have strong argument. Therefore in the history of first general election 1955, the members of INA and PIR had followed in political area and there is no influence to the democratitation in that time. According to Human Right perception and the constitution of 1945 (after amandment) the right to vote and be elected in general elections is fundamental right. Thats right is protected by constitution and it is non-derogable right occur to all indonesians without exception; second, the members of INA and PIRi as an Indonesians as a personal have same positions with the other civilian. The total members of INA and PIR around 400.000, the distnce is very far than the total civil indonesians. It's mean that if the right to vote of INA and PIR are coursed to vote a candidate or a party, that is not much influence to the result of general election; third, right to vote and be elected is the characterizerightof personal and not institutional. Therefore, State have responsibility to respect Human Right and forbid to lose a human right from people. The wisdom of Government to forbid the members of INA and PIRto give their right to vote and be elected in general election is a discrimination to the people, because of job and social status. State necessary give equal treatment and fair, without any discriminations to the people.*

*Based on the research result is recommended, that first, reconceptulitation and revise of right to vote and be elected for members ofINAand PIR; second, need revise to the law has controlled right to vote and be elected INA and PIR, Law Number 34 Year 2004 about Indonesian National Army Article 39; Law Number 2 Year 2002 about Police in the Indonesia Republic Article 28 (1) and (2); Article 326 Law Number 8 Year 2012 about election the members of House Representative should be revised.*

## **RIWAYAT HIDUP**

### **I. IDENTITAS**

1. Nama : Basuki Kurniawan.
2. Tempat/Tgl Lahir : Lumajang, 6 Pebruari 1989.
3. Pekerjaan : Staf Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jenderal Sudirman Lumajang.
4. Nama Ayah-Ibu : Bandil Suwagi - Mujiasih, S. Pd.
5. Agama : Islam.
6. Alamat : Desa Sumberjati RT/RW 016/003, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang.

### **II. RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. Sekolah Dasar Negeri Sumberjati 01 Kabupaten Lumajang, tamat tahun 2001.
2. Sekolah Menengah Pertama Wahidiyah Kota Kediri, tamat tahun 2004.
3. Sekolah Menengah Atas Wahidiyah Kota Kediri, tamat tahun 2007.
4. Program S1 pada Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Wahidiyah Kedunglo Kediri, lulus tahun 2011.
5. Program Magister (S2) Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Jember 2012 hingga sekarang.

### **III. RIWAYAT PEKERJAAN**

1. Staff Pengajar pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jenderal Sudirman Lumajang dari 2014 sampai sekarang.



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian dan penulisan tesis yang berjudul ‘Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Berpolitik Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pemilihan Umum’ ini dapat terselesaikan dengan baik.

Tesis ini menguraikan berbagai persoalan yang terkait dengan perlindungan hukum kebebasan berpolitik Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam sejarah perkembangannya terjadi pasang surut dalam keikutsertaan TNI dan Polri untuk mempunyai hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.

Kajian dalam tesis ini disamping secara teoritikal mencoba mendekati persoalan-persoalan yang timbul di bidang Hak Asasi Manusia dari persepektif yuridis, juga secara praktikal berusaha untuk memberikan kontribusi pemikiran yang bersifat prospektif, yang dalam tesis ini diwujudkan dalam sebuah gagasan perlindungan hukum untuk hak memilih dan dipilih bagi TNI dan Polri di Indonesia sebagai alternatif pemikiran ke depan. Sebagai sebuah gagasan tentunya, konsep pemberian hak untuk berpolitik khususnya hak untuk memilih dan dipilih bagi TNI dan Polri di pemilihan umum memerlukan banyak pemikiran dan pertimbangan. Akan tetapi, bagi penulis yang penting adalah, bahwa gagasan ini mesti harus berkembang dalam proses pemikiran dialektik yang berada di ranah keilmuan.

Penulisan tesis ini dapat terselesaikan, tidak lepas dari bimbingan dan pengarahan yang tiada bosan-bosannya dari Dosen Pembimbing, yang terdiri dari Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H. M. Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dr. Jayus, S.H.,M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Anggota. Rasanya penulis tidak mampu membalas budi baik yang telah diberikan dengan tulus kepada penulis selama ini. Penulis haturkan ucapan terima kasih, teriring do’a kepada Allah SWT, *“Jazaa Kumullohu Khoirooti Wa Sa’adatid Dunya Wal*

*Akhiroh*” amiin. Semoga kepada beliau berdua selalu diberikan limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya yang tak terhingga di dunia dan akhirat.

Tesis ini dapat terselesaikan berkat dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis juga menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Hadrotul Mukarrom Kanjeng Romo K. H. Abdul Latif Madjid Ra., Pengasuh Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munadhhoroh yang senantiasa memberikan bimbingan lahir dan batin.
2. Bapak Drs. Hasan, M.Sc.,Ph.D., selaku Rektor Universitas Jember beserta staf yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti program Magister dalam bidang Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas Jember;
3. Bapak Direktur Program Pascasarjana Universitas Jember beserta staf yang telah menyelenggarakan proses pendidikan dan membantu semua urusan penulis berkenaan dengan kegiatan akademis di Program Pascasarjana Universitas Jember;
4. Bapak Dr. Widodo Ekadjahjana, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah berkenan memberikan masukan dan catatan kritisnya, sehingga Naskah Tesis tersebut lebih berkualitas ilmiah;
5. Bapak Dr. Jayus, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jember, selaku Dosen Pembimbing Anggota yang memberikan dorongan dan semangat kepada penulis selama menempuh studi S-2 ini;
6. Para Guru Besar yang amat sangat terpelajar pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Jember, yakni: Prof. Dr.H. Tjuk Wirawan, S.H., Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H.,M.H., Prof. Dr.H. M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N., Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S., Dr. Dominkus Rato, S.H., M.Si., Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H., Dr. Dyah Octorina, S.H., M.H., Dr. Aries Harianto,S.H., M.H., atas segala ilmu, dan keteladanan ilmiah yang telah diterima penulis. Keragaman perspektif dan pengayaan nuansa keilmuan (hukum), dan peletak dasar bagi karya-karya intelektual penulis pada masa mendatang;
7. Pengelola Administrasi Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jember, Mbak Nita, Mbak Nurul, Mas Abbas, serta Pak Narto yang telah memberikan pelayanan yang begitu cepat dan tepat disampaikan;
8. Ketua STIH Jenderal Sudirman Lumajang dan Pembantu Ketua I, tempat di mana penulis mengabdikan sebagai tenaga pengajar;
9. Rekan-rekan peserta Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jember Angkatan 2012, yakni : Mas Fian, Mas Anam, Mbak Icha, Mas Demas, Mas Fatchan, Om Denny, (Almarhum) Pak Cahyo, Mas Yudha dan lain-lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Kebersamaan, canda tawa dan motivasi dari rekan-rekan sekalian yang tak akan pernah terlupakan;

10. Kakak-kakaku Prasetyo Muji Nugroho, Atik Setyawati, S.E., Aris Widodo, S.Pd., Neng Fitria Andayani, S.Pd. dan keponakan-ponakanku tersayang Muhammad Eko Prasetya, Muhammad Yunior Eka Risfianto, dan Meirina Dwi Fajriyah, terima kasih atas doa-doanya serta kebersamaan dan keceriaan yang menyemangati ketika penulis menyelesaikan tesis;
11. Ayahanda Bandil Suwagi dan Ibunda Mujiasih, S.Pd yang telah dengan kasih sayangnya memberikan semangat, dorongan dan bantuan moril serta materiil dan pengorbanan yang tak ternilai harganya.

Sebagai penutup kiranya tidak berlebihan jika penulis sampaikan bahwa manakala terdapat kekurangan dan kesalahan dalam naskah Tesis ini semata-mata karena kekurangan dan keterbatasan kemampuan penulis. Akhirnya, semoga Tesis ini dapat memberikan kebaikan dan manfaat dalam rangka ikut memberikan warna pelangi keilmuan Hukum di Indonesia. Terima kasih Tuhanku semua ini karena Engkau yang berkenan menyertai hambaMu.

Jember, Juni 2014

P e n u l i s,

## DAFTAR ISI

1.	Halaman Sampul Depan .....	i
2.	Persetujuan Penelitian Tesis .....	ii
3.	Penetapan Panitia Penguji Tesis .....	iii
4.	Motto dan Persembahan .....	iv
5.	Pernyataan Orisinilitas Tesis .....	v
6.	Ringkasan .....	vi
7.	Summary .....	vii
8.	Riwayat Hidup .....	viii
9.	Kata Pengantar .....	ix
10.	Daftar Isi .....	xii
<b>BAB 1</b>	<b>: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1	Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2	Rumusan Masalah .....	10
1.3	Tujuan Penelitian .....	11
1.4	Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1.	Manfaat Akademis .....	12
1.4.2.	Manfaat Praktis .....	12
1.5	Metode Penelitian .....	12
1.5.1.	Tipe Penelitian .....	12
1.5.2.	Pendekatan Masalah .....	13
1.5.3.	Sumber Bahan Hukum.....	14
1.5.4.	Pengumpulan Bahan Hukum.....	15

1.5.5. Analisis Bahan Hukum.....	16
<b>BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
2. 1. Teori Demokrasi dan Pemilu .....	17
2.2. Hak Asasi Manusia .....	27
2. 3. Teori Perlindungan Hukum.....	34
<b>BAB 3 : KERANGKA KONSEPTUAL.....</b>	<b>39</b>
<b>BAB 4 : PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
4.1. Hak Memilih serta Dipilih Anggota TNI dan Polri dalam Pemilihan Umum .....	43
4.1.1. Hak Memilih serta Dipilih Anggota TNI dan Polri dalam Pemilihan Umum Era Orde Lama (Tahun 1945-1970).....	45
4.1.2. Hak Memilih serta Dipilih Anggota TNI dan Polri dalam Pemilihan Umum Era Orde Baru (Tahun 1971-1997) .....	51
4.1.3. Hak Memilih serta Dipilih Anggota TNI dan Polri dalam Pemilihan Umum Era Reformasi (Tahun 1999- Sekarang) .....	59
4.1.4. Pemilihan Umum dan Asas-asas Hukum yang Melandasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.....	66
4.2. Konsep Perlindungan Hukum bagi Anggota TNI dan Polri dalam Kebebasan Berpolitik/HAM .....	79

4.2.1. Perlindungan HAM merupakan wujud dari Sebuah Kedaulatan .....	79
4.2.2. Hubungan Hukum, Demokrasi, dan HAM.....	87
4.2.3. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Memilih dan Dipilih bagi Anggota TNI dan Polri dengan Konsepsi HAM dan UUD NRI Tahun 1945 .....	90
<b>BAB 5 : PENUTUP</b> .....	104
5.1. Kesimpulan .....	104
5.2. Saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	107